

LAPORAN KINERJA (LKJ)

BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

TRIWULAN II



TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud. Sebagaimana amanat peraturan Menteri PAN&RB No.53 tahun 2014 jo. Pasal 3 dan 4 Perbub no.6 tahun 2018 disebutkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan LKJ.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan I Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- 1) penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan analisa dan kajian keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 8) pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan melalui



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan masyarakat	Tingkat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih baik	100%
		Tingkat penyelenggaraan kegiatan di tempat peribadahan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan	100%

Sementara itu, anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.868.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.841.411
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.088.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.550.000
6	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	22.038.617.750
	JUMLAH	22.282.285.161



2.2. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = 4 / 3
Meningkatnya kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan masyarakat	Tingkat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih baik	100 %	89 %	89 %
	Tingkat penyelenggaraan kegiatan di tempat peribadahan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan	100 %	0 %	0 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.



Tabel 2.4
Cost per outcome Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 - Tribulan II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan masyarakat	Tingkat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih baik				100 %	89 %	89 %
		Tingkat penyelenggaraan kegiatan di tempat peribadahan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan				100 %	0 %	0 %



1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.320.000	467.000	20 %	1 Dok	1 Dok	100%
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.868.000	9.945.000	42 %	12 Dok	6 Dok	50 %
3	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.210.452	1.792.200	43 %	4 Paket	2 Paket	50 %



		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.240.000	12.802.500	15 %	12 Laporan	6 Laporan	50 %
4	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.800.000	218.685	5 %	12 Laporan	6 Laporan	50 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	51.288.000	20.863.467	41%	12 Laporan	6 Laporan	50 %
5	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.900.000	13.000.000	50 %	1 Unit	1 Unit	100 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17.650.000	3.470.000	20 %	26 Unit	6 Unit	23 %



6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi kegiatan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.524.746.750	536.413.000	2 %	20 Dokumen	10 Dokumen	50 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	318.337.000	169.750.000	53%	3 Dokumen	2 Dokumen	66 %
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	173.784.000	104.845.000	60%	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %



Indikator kinerja “Tingkat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih baik” tribulan II tahun 2025 tercapai 89 % yang terdiri dari kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab atas 6 (enam) kegiatan, yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Pada tribulan II Tahun 2025, evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Strategi yang Digunakan	Waktu Pelaksanaan
1.	Tingkat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih baik	a. Melaksanakan kegiatan Bina Mental b. Menyelenggarakan Hari Besar Keagamaan c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dan Tokoh masyarakat	Januari sampai dengan Desember 2025
2.	Tingkat penyelenggaraan kegiatan di tempat peribadahan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan b. Sosialisasi administrasi pelaksanaan bantuan	Januari sampai dengan Desember 2025



2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan;
3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai time schedule yang sudah ada;
4. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait;

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-



BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pelaksanaan Kinerja menyesuaikan Time Schedule;
3. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 02 Juli 2025
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP.19671005 199003 1 009



LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD FAISHOL, S.Sos

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. PAIMAN

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, **13** Januari 2025

PIHAK KEDUA

Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

PIHAK PERTAMA

AKHMAD FAISHOL, S.Sos

NIP. 19671005 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Progam	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Meningkatkan Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp. 2.320.000,-	APBD (DAU)
2. Meningkatkan Fasilitas Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 23.868.000,-	APBD (DAU)
3. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 117.841.411,-	APBD (DAU)
4. Meningkatkan Kualitas fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 56.088.000,-	APBD (DAU)
5. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp. 43.550.000,-	APBD (DAU)
6. Meningkatkan Kualitas fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 22.038.617.750,-	APBD (DAU)
JUMLAH	Rp. 22.282.285.161,-	

Lumajang, 13 Januari 2025

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYA SETDA
KABUPATEN LUMAJANG


Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN LUMAJANG


AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP. 19671005 199003 1 009



LAMPIRAN II

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TRIBULAN II TAHUN 2025**



DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI TERKAIT HIBAH



DOKUMENTASI KEGIATAN IDUL ADHA





DOKUMENTASI PEMBERANGKATAN CALON JAMAH HAJI



DOKUMENTASI PENYAMBUATAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI

